



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MASDI
2. Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM
3. NHK : 425404

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 280.000.000**

1. Tanah Seluas 4458 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 12.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/63 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 3068 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 648 m2/42 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 10095 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 4260 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 18.000.000
7. Tanah Seluas 2785 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 10.000.000
8. Tanah Seluas 1765 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 15.000.000
9. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA PASAMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 15.000.000
10. Tanah Seluas 1376 m2 di KAB / KOTA PASAMAN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 71.000.000**



1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.  
1.000.000
2. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI  
Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 392.750.000

III. HUTANG Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 272.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.